CAKRAWALA PENDIDIKAN

**FORUM KOMUNIKASI ILMIAH
DAN EKSPRESI KREATIF
ILMU PENDIDIKAN**

**Masyarakat Ekonomi AEAN (MEA)
Antara Ancaman dan Tantangan**

Membangun Kerukunan Antar Umat Beragama

Anaphor, Cataphor, and Exophor in Postcard Texts

**Membangun Intensi Kewirausahaan Bagi Mahasiswa LPTK
sebagai Alternatif Menyiapkan Kemampuan Memasuki Lapangan
Kerja Baru yang Mandiri**

Teaching Speaking Using Describe and Draw Technique

**Scrutinizing Students' Writing Using 6 + 1
Trait Writing to University Students**

**Grammatical Errors in Essay Writing at English
Department Students**

**Upaya Meningkatkan Hasil Belajar dan Motivasi Mahasiswa
Offering C melalui Model Pembelajaran *Advance Organizer***

**Implementasi PhoTransEdit dalam Pengajaran Pengucapan
Bahasa Inggris**

**Effectiveness of Using Reciprocal Method
in Teaching Reading Comprehension**

**Pelaksanaan Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor di Dinas
Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blitar**

**Figurative Language in The Selected Poems
of William Shakespeare**

Applying Mind Mapping Strategy in Speaking Learning Activity

**Penerapan *Active Learning* untuk Menanamkan Proses Berpikir
Intuitif pada Mahasiswa**

**Pengembangan Modul *Expository Essay Writing* Berbasis *Scientific
Approach* untuk Mahasiswa STKIP PGRI BLITAR**

CAKRAWALA PENDIDIKAN

Forum Komunikasi Ilmiah dan Ekspresi Kreatif Ilmu Pendidikan

Terbit dua kali setahun pada bulan April dan Oktober
terbit pertama kali April 1999

Ketua Penyunting

Kadeni

Wakil Ketua Penyunting

Saiful Rifa'i

Penyunting Pelaksana

R. Hendro Prasetianto

Udin Erawanto

Riki Suliana

Prawoto

Penyunting Ahli

Miranu Triantoro

Masruri

Karyati

Nurhadi

Pelaksana Tata Usaha

Yunus

Nandir

Sunardi

Alamat Penerbit/ Redaksi : STKIP PGRI Blitar, Jl. Kalimantan No. 111 Blitar, Telp. (0342) 801493.
Langganan 2 nomor setahun Rp. 50.000,00 ditambah ongkos kirim Rp. 5.000,00. Uang langganan dapat dikirim dengan wesel ke alamat Tata Usaha.

CAKRAWALA PENDIDIKAN diterbitkan oleh Sekolah Tinggi Keguruan dan ilmu Pendidikan PGRI Blitar. **Ketua :** Dra. Hj. Karyati, M.Si, **Pembantu Ketua :** M. Khafid Irsyadi, ST, M.Pd

Penyunting menerima sumbangan tulisan yang belum pernah diterbitkan dalam media cetak lain. Syarat-syarat, format, dan aturan tata tulis artikel dapat diperiksa pada *Petunjuk bagi Penulis* di sampul belakang-dalam jurnal ini. Naskah yang masuk ditelaah oleh Penyunting dan Mitra Bestari untuk dinilai kelayakannya. Penyunting melakukan penyuntingan atau perubahan pada tulisan yang dimuat tanpa mengubah maksud isinya.

CAKRAWALA PENDIDIKAN

Forum Komunikasi Ilmiah dan Ekspresi Kreatif Ilmu Pendidikan

Volume 17, Nomor 2, Oktober 2015

Daftar Isi

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) Antara Ancaman dan Tantangan <i>Miranu Triantoro</i>	118
Membangun Kerukunan Antar Umat Beragama <i>Udin Erawanto</i>	128
Anaphor, Cataphor, and Exophor in Postcard Texts <i>R. Hendro Prasetianto</i>	138
Membangun Intensi Kewirausahaan Bagi Mahasiswa LPTK sebagai Alternatif Menyiapkan Kemampuan Memasuki Lapangan Kerja Baru yang Mandiri <i>Ekkbal Santoso</i>	147
Teaching Speaking Using Describe and Draw Technique <i>Feri Huda</i>	157
Scrutinizing Students' Writing Using 6 + 1 Trait Writing to University Students <i>Dessy Ayu Ardini</i>	163
Grammatical Errors in Essay Writing at English Department Students <i>Herlina Rahmawati</i>	173
Upaya Meningkatkan Hasil Belajar dan Motivasi Mahasiswa Offering C melalui Model Pembelajaran <i>Advance Organizer</i> <i>Zemmy Indra Kumala Dewi</i>	181
Implementasi PhoTransEdit dalam Pengajaran Pengucapan Bahasa Inggris <i>M. Ali Mulhuda</i>	188
Effectiveness of Using Reciprocal Method in Teaching Reading Comprehension <i>Susianti, Nurhadi Muyoto</i>	196
Pelaksanaan Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor di Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blitar <i>Hery Nuryahman, Kadeni</i>	201
Figurative Language in The Selected Poems of William Shakespeare <i>Varia Virdania Virdaus</i>	208
Applying Mind Mapping Strategy in Speaking Learning Activity <i>Wiratno</i>	218
Penerapan <i>Active Learning</i> untuk Menanamkan Proses Berpikir Intuitif pada Mahasiswa <i>Cicik Pramesti</i>	225
Pengembangan Modul <i>Expository Essay Writing</i> Berbasis <i>Scientific Approach</i> untuk Mahasiswa STKIP PGRI BLITAR <i>Annisa Rahmasari, Saiful Rifa'i</i>	234

MEMBANGUN KERUKUNAN ANTAR UMAT BERAGAMA

Udin Erawanto

udinerawanto@gmail.com

STKIP PGRI BLITAR

Abstrak : Masyarakat Indonesia adalah majemuk tidak hanya dalam hal suku, bahasa, adat istiadat melainkan juga agama. Kemajemukan agama nampak adanya agama-agama besar seperti Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Konghucu berada di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Adanya keragaman dan perbedaaan tersebut merupakan suatu keniscayaan, sehingga perlu dikelola secara baik supaya tidak sampai menimbulkan konflik yang bisa menimbulkan retaknya persatuan dan kesatuan bangsa. Salah satu cara untuk membangun kerukunan antar umat beragama dapat dilakukan melalui dialog antar umat beragama. Kegiatan dialog perlu dirintis dan di inisiasi oleh antar pemeluk agama, FKUB, tokoh masyarakat dan pemerintah secara intensif.

Kata Kunci : kerukunan, antar umat beragama

Abstrack : Indonesia is a pluralistic society not only in terms of race, language, customs but also religion. Religious pluralism seems the major religions such as Islam, Christianity, Catholicism, Hinduism, Buddhism and Confucianism were in the midst of the people of Indonesia. Diversity and differences is a necessity, so it needs to be well managed so as not to cause conflicts that could lead to breakdown of national unity. One way to build harmony among religious believers can be done through interreligious dialogue. Activities need to be initiated and a dialogue initiated by the inter religious, FKUB, community leaders and government intensively.

Key Words : harmony, religious interreligious

PENDAHULUAN

Masyarakat Indonesia adalah majemuk tidak hanya dalam hal suku, bahasa, adat istiadat melainkan juga agama. Kemajemukan agama nampak adanya agama-agama besar seperti Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Konghucu berada di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Keberagaman agama dalam kehidupan masyarakat perlu dikelola dengan baik supaya tercipta dinamika kehidupan beragama dan kerukunan antar umat beragama. Mengapa demikian, mengingat masalah agama sangat peka sekali, mudah menyulut terjadinya

konflik dan menimbulkan terjadinya disintegrasi bangsa. Pendapat senada dikemukakan Wirutomo (2012:53) dinamika interaksi yang terjadi antar kelompok penganut agama maupun keyakinan, pada satu sisi dapat berpotensi meningkatkan solidaritas dan integritas sosial kelompok. Tapi pada sisi yang lain dapat terjadi gesekan antar kelompok karena bekerjanya berbagai faktor sosial, politik bahkan ekonomi.

Terjadinya konflik di masyarakat tidak jarang dikaitkan dengan masalah agama, meskipun pada kenyataannya konflik di masyarakat itu dipicu persoalan pribadi.

Berbagai konflik yang terjadi di Indonesia akhir-akhir ini memang bukan semata-mata karena faktor perbedaan agama. Namun yang harus diakui bahwa agama seringkali digunakan oleh kelompok yang bertikai sebagai legitimasi bagi tindakannya atau digunakan sebagai pijakan dalam membangun solidaritas kelompoknya dalam berhadapan dengan kelompok lain.

Terkait dengan faktor yang bisa memicu terjadinya konflik antar umat beragama, Azra sebagaimana dikutip Wirutomo (2012:161) mencatat tentang lima faktor yang menjadi sumber konflik antar kelompok agama di Indonesia (terutama Islam-Kristen). *Pertama* adalah penerbitan tulisan-tulisan yang dianggap mencemarkan agama. *Kedua*, bila ada usaha penyebaran agama yang dilakukan secara agresif. *Ketiga*, bila pemeluk agama beribadah ditempat yang bukan merupakan tempat ibadah. *Keempat*, bila ada penetapan dan penerapan peraturan pemerintah yang dipandang diskriminatif dan membatasi penyebaran agama. *Kelima*, adanya kecurigaan timbal balik berkaitan dengan posisi dan peranan agama dalam negara.

Fenomena di atas memang tidak dapat dihindari sehingga perlu upaya bagaimana menciptakan kesepahaman dan kerjasama yang baik intern pemeluk agama, antar umat beragama, dengan pemerintah untuk bersama-sama menciptakan dan mewujudkan kehidupan yang rukun, aman, tentram dan damai di masyarakat. Indikator yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan dalam membina kerukunan antar umat beragama adalah semakin berkurangnya berbagai konflik bernuansa agama di berbagai

daerah dan semakin berkembangnya geliat pendidikan multikultural diberbagai tingkat dan jenjang pendidikan. Terkait dengan keberhasilan program kerukunan tersebut, saat ini Indonesia dianggap sebagai laboratorium kerukunan antar umat beragama. Hal ini sebagaimana diungkapkan menteri luar negeri Italia Franco Frattini dan pendiri komunitas Sant' Egidio, Andrea Riccardi dalam pidatonya pada pembukaan seminar internasional dengan tema "*Unty in Diversity: The Indonesian Model for a Society in which to Live Together*" yang digelar di Roma pada tanggal 4 Maret 2009.

Membangun kerukunan antar umat beragama perlu terus diperjuangkan mengingat kondisi kerukunan antar umat beragama tidak dapat terwujud secara alami. Sehubungan hal tersebut dalam membangun kerukunan antar umat beragama kita perlu menyadari akan adanya perbedaan, mengingat itu suatu keniscayaan. Yang terpenting adalah bagaimana kita memiliki komitmen yang kuat untuk menyadari adanya perbedaan tersebut secara bersama, kemudian menghargai dan mengelolanya dengan baik.

Membangun kerukunan antar umat beragama membutuhkan kesadaran dan tanggungjawab semua pihak. Sudah barang tentu menurut hemat penulis yang paling berperan mewujudkan keharmonisan hidup umat yang plural ini adalah pemerintah. Bahkan secara konstitusional peranan pemerintah dalam menciptakan keharmonisan hidup antar umat beragama tertuang di dalam Undang Undang Dasar 1945 pasal 29. Sedangkan untuk tataran kebijakan, pemerintah mengeluarkan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri

nomor 8 tahun 2006 dan nomor 9 tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/ Wakil Kepala daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat.

Dalam peraturan bersama tersebut telah diatur tugas Gubernur dengan Kakanwil Kementerian Agama serta Bupati/ Walikota yang dibantu oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota, untuk menjaga dan mengembangkan kerukunan, memberdayakan forum kerukunan umat beragama, serta pengaturan pendirian rumah ibadah bagi seluruh umat beragama, selama terdapat penganut agama di Kabupaten/ Kota tersebut. Peraturan bersama ini semakin memperjelas peran dan fungsi pemerintah dalam membina kerukunan umat beragama di Indonesia. Kehadiran pemerintah tidak hanya sekedar mengurus dan menyelesaikan konflik diantara mereka, tetapi justru memiliki tugas untuk melaksanakan pembinaan dan memberi pengarahan kepada semua pemeluk agama di Indonesia akan arti pentingnya hidup berdampingan antar umat beragama secara rukun, saling menghormati dan tepo seliro sehingga tercipta suasana kehidupan yang aman, damai dan tentram tanpa harus ada konflik.

MAKNA KERUKUNAN ANTAR UMAT BERAGAMA

Naim (2014:123) menjelaskan, kata rukun mengisyaratkan adanya kondisi yang damai. Lebih lanjut dikemukakan, rukun bukan berarti tidak ada perbedaan. Dengan demikian, rukun adalah kondisi ketika perbedaan tidak dijadikan sebagai sarana

untuk memaksa pihak lain. Apabila kita cermati pendapat diatas, kita akan menyadari bila perbedaan merupakan suatu keniscayaan, dan jangan dijadikan perbedaan ini sebagai alat untuk memperkeruh situasi sehingga menimbulkan konflik yang menjurus terjadinya disintegrasi bangsa. Justru malah sebaliknya, perbedaan ini seharusnya kita kelola dengan baik sehingga memperkuat persatuan dan kesatuan antar umat beragama.

Menurut hemat penulis, tidak ada satu pun agama yang mengajarkan konflik atau kekerasan kepada pemeluknya. Kalau kita cermati, semua agama mengajarkan nilai-nilai kebajikan kepada pemeluknya. Dengan demikian makna kerukunan antar umat beragama itu dilandasi dengan sikap penuh toleransi, saling menghormati, saling pengertian, saling menghargai antar umat beragama. Pendapat senada dikemukakan Sumbulan dan Nurjanah (2013:48) secara normatif, semua agama mengajarkan nilai-nilai kebaikan, cinta kasih, perdamaian dan persaudaraan. Agama juga mengajarkan toleransi beragama, yang berarti tidak ada paksaan dalam beragama, sehingga setiap penganut suatu agama harus saling menghormati keyakinan dan kepercayaan penganut agama yang lain. Dengan demikian toleransi dan kerukunan sejati antar umat beragama itu tumbuh dan berangkat dari kesadaran nurani dan inisiatif semua fihak yang terlibat didalamnya, dan harus diupayakan, dibangun dan dibina secara bertahap.

Agar kerukunan hidup umat beragama dapat terwujud dan senantiasa terpelihara, perlu memperhatikan upaya-upaya yang mendorong terjadinya kerukunan secara

mantap dalam bentuk (1) Memperkuat dasar-dasar kerukunan internal dan antar umat beragama, serta antar umat beragama dengan pemerintah. (2) Membangun harmoni sosial dan persatuan nasional, dalam bentuk upaya mendorong dan mengarahkan seluruh umat beragama untuk hidup rukun dalam bingkai teologi dan implementasi dalam menciptakan kebersamaan dan sikap toleransi. (3) Menciptakan suasana kehidupan beragama yang kondusif, dalam rangka memantapkan pendalaman dan penghayatan agama serta pengamalan agama, yang mendukung bagi pembinaan kerukunan hidup intern umat beragama dan antar umat beragama. (4) Melakukan eksplorasi secara luas tentang pentingnya nilai-nilai kemanusiaan dari seluruh keyakinan plural umat manusia, yang fungsinya dijadikan sebagai pedoman bersama dalam melaksanakan prinsip-prinsip berpolitik dan berinteraksi sosial satu sama lainnya dengan memperlihatkan adanya sikap keteladanan. (5) Melakukan pendalaman nilai-nilai spiritual yang implementatif bagi kemanusiaan yang mengarahkan kepada nilai-nilai ketuhanan, agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan nilai-nilai sosial kemasyarakatan maupun sosial keagamaan. (6) Menempatkan cinta dan kasih dalam kehidupan umat beragama dengan cara menghilangkan rasa saling curiga terhadap pemeluk agama lain, sehingga akan tercipta suasana kerukunan yang manusiawi tanpa dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu. (7) Menyadari bahwa perbedaan adalah suatu realita dalam kehidupan bermasyarakat, oleh sebab itu hendaknya hal ini dijadikan mozaik yang dapat memperindah fenomena kehidupan beragama. (mochlasin31.blingspot.com.2014/1,

Berbagai Upaya dalam Mewujudkan Kerukunan Umat Beragama, diakses tanggal 23 September 2015).

TRI KERUKUNAN ANTAR UMAT BERAGAMA

Menyadari akan keberagaman agama di masyarakat, pemerintah telah mencanangkan konsep Tri Kerukunan antar umat beragama sejak tahun 1970-an. Tri kerukunan antar umat beragama tersebut meliputi kerukunan intern umat beragama, kerukunan antar umat Beragama, dan kerukunan umat beragama dengan pemerintah. Tujuan dari dicanangkan Tri Kerukunan Umat Beragama di Indonesia agar masyarakat Indonesia bisa hidup dalam kebersamaan, sekalipun banyak perbedaan. Dengan terciptanya Tri Kerukunan Umat Beragama ini kedepannya akan bisa lebih memantapkan stabilitas nasional dan memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa.

Kerukunan intern umat beragama; perbedaan pandangan dalam satu agama bisa melahirkan konflik di dalam tubuh suatu agama itu sendiri. Adanya perbedaan penafsiran, pemahaman terhadap satu sumber aqidah yang sama dapat menimbulkan terjadinya konflik di kalangan intern umat beragama. Untuk itu perlu dihindari timbulnya permasalahan dan terjadinya permusuhan hanya karena perbedaan mazab. Semua itu semata hanya untuk menciptakan kehidupan yang aman, damai dan tenteram dalam kebersamaan.

Kerukunan antar umat beragama; hal ini mengandung pengertian suatu kehidupan beragama yang tentram, harmonis, rukun dan damai antar masyarakat yang

berbeda agama dan keyakinan. Tidak ada sikap yang saling mencurigai dan senantiasa hidup saling hormat menghormati dan tepo seliro antar pemeluk agama. Semua masyarakat bersama-sama menciptakan suasana hidup yang rukun, damai, tenteram dan harmonis dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.

Kerukunan Umat Beragama dengan Pemerintah; Negara Indonesia memang bukan negara agama, artinya negara yang tidak mendasarkan kehidupan kenegaraannya pada salah satu agama. Tetapi pemerintah berkewajiban melayani dan menyediakan kemudahan-kemudahan bagi agama-agama yang ada di masyarakat Indonesia. Di dalam Bab IX pasal 19 Ayat (1) UUD 1945 dijelaskan, bahwa agama dan syariat agama dihormati dan didudukkan dalam nilai asasi kehidupan bangsa dan negara. Dan setiap pemeluk agama bebas menganut agamanya dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu.

PENTINGNYA DIALOG ANTAR UMAT BERAGAMA

Perlu kita sadari bahwa masyarakat yang penuh dengan keragaman, termasuk keragaman agama, potensi terjadinya konflik sangat terbuka dan aspek pemicunya-pun sangat beragam baik dipicu oleh persoalan politik, ekonomi ataupun persoalan lainnya. Sudah barang tentu semua itu perlu ada upaya penyelesaian yang dilakukan secara bijaksana, sehingga dapat dijadikan proses pembelajaran menuju kedewasaan dalam berfikir dan bersikap dalam menghadapi permasalahan termasuk penyelesaiannya dari berbagai kejadian.

Sehubungan hal tersebut menurut hemat penulis, perlu dibangun dan dibuka ruang dialog antar umat beragama secara terus menerus dengan tujuan untuk membangun pemahaman dan saling pengertian sehingga tidak saling mencurigai antar umat beragama. Kata dialog sendiri berasal dari kata Yunani yaitu *dia* yang berarti antara, diantara, bersama, dan *legein* yang berarti berbicara, bercakap-cakap, bertukar pemikiran, dan gagasan. Naim (2014:172-173) menjelaskan, ada beberapa alasan mengapa dialog signifikan untuk digelar antar umat beragama. *Pertama*, adanya dialog menunjukkan bahwa pesertanya bukan orang-orang fanatik. *Kedua*, dialog yang dilakukan dapat menghasilkan pengetahuan baru yang bermanfaat. *Ketiga*, dialog dapat menumbuhkan sebuah komunitas yang toleran. *Keempat*, antitesis intoleransi. Dialog antar umat beragama adalah sangat penting untuk menghilangkan kecurigaan dan kesalahpahaman antar umat beragama dengan lebih mempromosikan harmoni dan kerjasama.

Secara praktis Azra sebagaimana dikutip Naim (2014:178) menawarkan beberapa bentuk dialog. *Pertama*, dialog parlementer, yakni dialog yang melibatkan ratusan peserta yang datang dari berbagai unsur masyarakat baik pada tingkat lokal, regional, maupun internasional. *Kedua*, dialog kelembagaan, yakni dialog diantara wakil-wakil institusional berbagai organisasi agama. Dialog kelembagaan ini sering dilakukan untuk membicarakan dan memecahkan masalah-masalah mendesak yang dihadapi umat beragama yang berbeda. Selain itu, dialog kelembagaan juga berusaha menciptakan

dan mengembangkan komunikasi diantara wakil-wakil kelembagaan dari organisasi-organisasi berbagai agama. Ketiga, dialog teologi. Dialog-dialog ini mencakup pertemuan-pertemuan untuk membahas persoalan-persoalan teologis dan filosofis. Keempat, dialog dalam masyarakat dan dialog kehidupan, Kelima, dialog kerohanian. Dialog seperti ini bertujuan untuk menyuburkan dan memperdalam kehidupan spiritual diantara berbagai agama.

Sumbulan dan Nurjanah (2013:239) mengemukakan, dialog adalah upaya untuk menjembatani bagaimana benturan bisa dieliminisir, sehingga memerlukan standar universal untuk semua agama. Standar tersebut hendaknya bermuara pada moralitas dan etika global, yaitu hak asasi manusia, kebebasan, demokrasi, keadilan dan perdamaian. Suatu dialog dapat mencapai hasil yang diharapkan apabila memenuhi hal-hal berikut ini: (1) adanya keterbukaan dan transparansi. Terbuka artinya mau mendengarkan semua pihak secara proporsional, adil dan setara. (2) adanya kesadaran tentang fakta perbedaan. Perbedaan merupakan sesuatu yang wajar dan memang merupakan suatu realita yang tidak dapat dihindari. (3) adanya sikap kritis terhadap sikap eksklusif dan segala kecenderungan untuk meremehkan dan mendeskreditkan agama yang dianut orang lain, dan saling memberikan pertimbangan serta memberikan pendapat kepada orang lain berdasarkan keyakinannya sendiri. (4) adanya kemauan secara aktif untuk memahami kepercayaan, ritus, dan simbol agama dalam rangka untuk memahami orang lain secara benar. Selanjutnya juga dikemukakan, terdapat

sejumlah permasalahan yang dapat menghambat pelaksanaan dialog dan kerjasama antar umat beragama, diantaranya: (1) kurang memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang agama-agama lain secara benar dan seimbang, sehingga berakibat kurangnya penghargaan dan muncul sikap saling mencurigai antar satu dengan yang lain. (2) faktor-faktor sosial politik dan trauma konflik-konflik dalam sejarah. (3) munculnya sekte-sekte keagamaan yang tidak ada sikap kompromistik dengan memakai ukuran kebenaran secara hitam putih. (4) masih adanya kecurigaan dan ketidakpercayaan kepada orang lain atau kerukunan semu. (5) penafsiran tentang misi atau dakwah yang konfrontatif dan masih adanya idiologi triumphalistik diantara penganut agama-agama yang ada, sehingga memiliki orientasi dan misi dakwah yang dapat memicu konflik (6) adanya ketegangan politik yang melibatkan kelompok agama.

TUGAS PEMERINTAH DALAM MEMBANGUN KERUKUNAN ANTAR UMAT BERAGAMA

Melalui Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 tahun 2006 dan Nomor 8 tahun 2006, tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat. Dalam Peraturan bersama ini diatur tugas Gubernur dengan Kakanwil Kementerian Agama serta Bupati/Walikota yang dibantu oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota, untuk menjaga dan mengembangkan kerukunan

umat beragama, serta pendirian rumah ibadah bagi seluruh umat beragama, selama terdapat sejumlah penganut agama di Kabupaten/ Kota tersebut.

Adapun tugas Bupati/ Walikota sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan bersama Menteri dalam negeri dengan Menteri Agama pasal 4 sebagai berikut : (1) memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat termasuk memfasilitasi terwujudnya kerukunan umat beragama di provinsi, (2) mengkoordinasikan kegiatan instansi vertikal di propinsi dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama, (3) menumbuh kembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati, dan saling percaya diantara umat beragama, dan (4) membina dan mengkoordinasikan Bupati/ Wakil Bupati dan Walikota/ Wakil Walikota dalam penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang ketentraman dan ketertiban masyarakat dalam kehidupan beragama.

Pemerintah sebagai pelayan, mediator atau fasilitator merupakan salah satu elemen yang dapat menentukan kualitas atau persoalan umat beragama tersebut. Pada prinsipnya, umat beragama perlu dibina melalui pelayanan aparat pemerintah yang memiliki peran dan fungsi strategis dalam menentukan kualitas kehidupan umat beragama, melalui kebijakannya. Dalam rangka perwujudan dan pembinaan di tengah keberagaman agama budaya dan bangsa, maka "Said Agil Husin Al Munawar mengungkapkan bahwa kerukunan umat beragama memiliki hubungan yang sangat erat dengan faktor ekonomi dan politik. Di samping faktor-faktor lain seperti penegakkan hukum, pelaksanaan prinsip-

prinsip keadilan dalam masyarakat dan peletakkan sesuatu pada proporsinya". Dalam kaitan ini strategi yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut: (1) Memberdayakan institusi keagamaan, artinya lembaga-lembaga keagamaan kita daya gunakan secara maksimal sehingga akan mempercepat proses penyelesaian konflik antar umat beragama. Disamping itu pemberdayaan tersebut dimaksudkan untuk lebih memberikan bobot/warna tersendiri dalam menciptakan ukhuwah (persatuan dan kesatuan) yang hakiki, tentang tugas dan fungsi masing-masing lembaga keagamaan dalam masyarakat sebagai perekat kerukunan antar umat beragama. (2) Membimbing umat beragama agar makin meningkat keimanan dan ketakwaan mereka kepada Tuhan Yang Maha Esa, dalam suasana rukun baik intern maupun antar umat beragama. (3) Melayani dan menyediakan kemudahan bagi para penganut agama. (4) Tidak mencampuri urusan akidah/ dogma dan ibadah sesuatu agama. (5) Mendorong peningkatan pengamalan dan penuaian ajaran agama. (6) Melindungi agama dari penyalahgunaan dan penodaan. (7) Mendorong dan mengarahkan seluruh umat beragama untuk hidup rukun dalam bingkai Pancasila dan konstitusi dalam tertib hukum bersama. (8) Mendorong, memfasilitasi dan mengembangkan terciptanya dialog dan kerjasama antara pimpinan majelis-majelis, dan organisasi-organisasi keagamaan dalam rangka untuk membangun toleransi dan kerukunan antar umat beragama. (9) Mengembangkan wawasan multikultural bagi segenap lapisan dan unsur masyarakat melalui jalur pendidikan, penyuluhan dan riset aksi.

(10) Meningkatkan pemberdayaan sumber daya manusia (pemimpin agama dan pemimpin masyarakat lokal) untuk ketahanan dan kerukunan masyarakat bawah. (11) Fungsionalisasi pranata lokal, seperti adat istiadat, tradisi dan norma-norma sosial yang mendukung upaya kerukunan umat beragama. (12) Mengundang partisipasi semua kelompok dan lapisan masyarakat agama sesuai dengan potensi yang dimiliki masing-masing, melalui kegiatan-kegiatan dialog, musyawarah, tatap muka, kerjasama sosial dan sebagainya. (13) Bersama-sama para pemimpin majelis-majelis agama, seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI), Konfrensi Wali Gereja Indonesia (KWI), Parishada Hindhu Dharma Indonesia (PHDI), dan Perwakilan Umat Budha Indonesia (WALUBI), Majelis Tinggi Agama Khonghuchu Indonesia (MATAKIN), Departemen agama melalui Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan melakukan kunjungan bersama-sama ke berbagai daerah dalam rangka berdialog dengan umat di lapisan bawah dan memberikan pengertian tentang pentingnya membina dan mengembangkan kerukunan umat beragama. (14) Melakukan mediasi bagi kelompok-kelompok masyarakat yang dilanda konflik, (misalnya; kasus Ambon dan Maluku Utara) dalam rangka untuk mencari solusi bagi tercapainya rekonsiliasi, sehingga konflik bisa diberhentikan dan tidak berulang di masa depan. (15) Memberi sumbangan dana (sesuai dengan kemampuan), kepada kelompok-kelompok masyarakat yang terpaksa mengungsi dari daerah asal mereka, karena dilanda konflik sosial dan etnis yang

dirasakan pula bernuansakan keagamaan. (16) Membangun kembali sarana-sarana ibadah (Gereja dan Masjid) yang rusak di daerah-daerah yang masyarakatnya terlibat konflik, sehingga mereka dapat memfungsikan kembali rumah-rumah ibadah tersebut. (mochlasin31.blogspot.com.2014/1, Berbagai Upaya dalam Mewujudkan Kerukunan Umat Beragama, diakses tanggal 23 September 2015).

PERAN PEMERINTAH DALAM MENCiptAKAN KERUKUNAN ANTAR UMAT BERAGAMA

Peran serta dan upaya-upaya yang harus dilakukan pemerintah, agar kerukunan hidup umat beragama dapat terwujud dan tetap terpelihara yaitu: (1) Pemerintah tidak mencampuri masalah Akidah. Di dalam memberikan bimbingan, pembinaan dan pelayanan tersebut, pemerintah sama sekali tidak mencampuri masalah akidah dan kehidupan intern masing-masing agama dan pemeluknya. Namun pemerintah perlu mengatur kehidupan ekstern mereka, yaitu dalam hubungan kenegaraan dan hubungan antar pemeluk agama yang berbeda dari Warganegara Republik Indonesia. (2) Agama dan syariat Agama dihormati dan didudukkan dalam nilai asasi pada kehidupan bangsa dan negara. Dalam kegiatan kenegaraan dan praktek ketatanegaraan, ajaran dan pengamalan serta upacara agama sangat berperan dan dihormati. (3) Melayani dan menyediakan kemudahan bagi agama Islam, Kristen, Protestan, Katolik, Hindu dan Budha. Pemerintah dalam batas dan kemampuannya yang ada bertugas mengadakan fasilitas kehidupan beragama antara lain berupa

rumah-rumah ibadah, kitab-kitab suci, penataran dan peningkatan mutu bagi petugas-petugas/ rohaniawan-rohaniawan yang ada. Pengadaan sarana-sarana tersebut disamping membantu memenuhi kebutuhan-kebutuhan untuk tempat ibadah dan kitab-kitab suci, juga diarahkan untuk membimbing dan merangsang para pemeluk agama untuk mengadakan sendiri kebutuhan-kebutuhan tersebut. (4) Setiap pemeluk agama bebas memeluk agamanya, dan beribadah menurut agama dan kepercayaan itu. Kebebasan beragama dan melakukan ibadah merupakan hak asasi setiap manusia. Bahkan merupakan hak asasi yang paling dalam. Dalam beberapa kesempatan dinyatakan oleh Bapak Presiden bahwa hak/ kebebasan beragama menjalankan ibadah adalah bukan pemberian dari negara atau pemerintah. Hal ini adalah milik hak dan hak setiap warga negara. Dalam hal ini pemerintah berkewajiban menjaga agar pelaksanaan hak-hak tersebut tidak saling bertubrukan, sehingga justru menimbulkan dan mengurangi kebebasan itu sendiri. Dengan perkataan yang lain, penggunaan kebebasan beragama tersebut harus dilakukan secara "bertanggung jawab". (5) Pemerintah ikut memikul tanggung jawab dalam pembinaan kerukunan hidup umat beragama. Kerukunan hidup umat beragama merupakan prasyarat bagi stabilitas dan persatuan bangsa. Stabilitas dan kesatuan bangsa merupakan syarat berhasilnya pembangunan nasional. Untuk itu maka pembinaan kerukunan hidup umat beragama menjadi prioritas pembangunan nasional khususnya pembangunan di bidang agama. (6) Dalam melayani kehidupan beragama dan pembinaan kerukunan hidup umat beragama,

pemerintah memperhatikan keanekaragaman ajaran-ajaran agama. Keanekaragaman ini dapat berupa kondisi "ajaran agama" dalam memandang negara, bangsa dan masyarakat, kondisi kemampuan dan jumlah pemeluk dari suatu agama. (7) Agama dilindungi dari penyalahgunaan dan penodaan. (mochlasin31.bligspot.com.2014/1, Berbagai Upaya dalam Mewujudkan Kerukunan Umat Beragama, Diakses tanggal 23 September 2015).

PENUTUP

Kerukunan antar umat beragama merupakan kata kunci untuk mewujudkan kehidupan yang aman, tentram dan harmonis di masyarakat. Kerukunan antar umat beragama sifatnya dinamis, sewaktu-waktu dapat berubah menjadi konflik akibat dipicu berbagai persoalan baik politik, ekonomi maupun masalah pribadi, dan jika kondisi yang demikian tidak mendapat perhatian secara serius dapat menimbulkan disintegrasi bangsa. Supaya konflik antar umat beragama tidak terjadi perlu diupayakan tumbuhnya kesadaran pentingnya menciptakan kerukunan antar umat beragama dari dalam diri masyarakat pemeluk agama itu sendiri. Sehubungan hal tersebut perlu diwujudkan kerukunan intern pemeluk agama, antar umat agama, dan antar pemeluk agama dengan pemerintah.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh masyarakat, tokoh agama dan pemerintah untuk mewujudkan suasana kehidupan antar umat beragama yang harmonis, penuh toleransi, tepo seliro dan saling menghormati. Salah satunya melalui kegiatan dialog antar umat beragama yang didasari atas sikap saling memberi dan menerima informasi sehingga dapat menghindari tumbuhnya sikap saling